



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email: forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal

Verawaty¹, Rolia
Wahasusmiah², Amnah³

Abstrak

Implementasi desentralisasi fiskal dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah melalui infrastruktur serta sarana dan prasarana publik bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Tingkat Jumlah Penduduk (TJP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mempengaruhi IPM melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan SPSS dan uji sobel. Hasil analisis substruktural I menunjukkan PAD, DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil analisis substruktural II menunjukkan hanya PAD, DAU, DBH dan BM berpengaruh terhadap IPM namun DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh. Uji sobel menunjukkan hanya DAU dan DBH berpengaruh melalui belanja modal terhadap IPM, sedangkan PAD, DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh melalui belanja modal terhadap IPM. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan alokasi dana, khususnya yang berkaitan dengan indikator IPM.

Kata Kunci: IPM, Faktor Keuangan, Tingkat Jumlah Penduduk, PDRB, Belanja Modal

Abstract

Implementation of fiscal decentralization by giving authority to local government will be able to improve regional capability to finance regional needs through infrastructure and public facilities for improving the quality of life and community welfare. It is reflected in the increase in Human Development Index (HDI) through the allocation of capital expenditure (CE). This study was aimed to analyze empirically the influence of local own-source revenue (LOR), general allocation fund (GAF), special allocation fund (SAF), revenue sharing fund (RSF), excess fund balance budget calculation (EFBBC), level of population (LP) and gross regional domestic product (GRDP) which affected HDI through CE as the intervening variable. This research was conducted in South Sumatera Province. Data were analyzed by using path analysis with SPSS and sobel test. The result of substructural analysis I showed that LOR, GAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect on CE, while SAF and RSF had positive effects on CE. The result of substructural analysis II showed that only LOR, GAF, RSF and CE affected HDI but GAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect. The sobel test showed that only GAF and RSF were influenced through CE, while LOR, SAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect through CE on HDI. The government should prioritize the allocation of fund, especially those related to HDI indicators.

Keywords: Human Development Index, Financial Factors, Level of Population, Gross Regional Domestic Product, Capital Expenditure

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: verawaty@binadarma.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: alkaffamnah15@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



PENDAHULUAN

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan bagi perbaikan taraf hidup masyarakat luas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, menjalankan kehidupan yang produktif serta perluasan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Salah satu komponen yang memegang peranan vital dalam pembangunan suatu negara adalah manusia, karena pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat karena kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat merupakan salah satu tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah (Verawaty, 2017). Meningkatnya kualitas masyarakat di suatu negara dapat memengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui seluruh komponen masyarakat baik itu pemerintah dan seluruh rakyat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui suatu parameter yang dapat menilai pencapaian pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia untuk selanjutnya disebut IPM atau *Human Development Index* (HDI).

Menurut Damayanti (2014), IPM merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut laporan HDI (UNDP, 2016) komponen-komponen HDI Indonesia antara lain yaitu angka harapan hidup (*life expectancy at birth*) dalam dimensi kesehatan, dimensi pendidikan melalui indikator harapan tahun bersekolah (*expected years of schooling*), rata-rata waktu sekolah (*mean years of schooling*) dan dimensi hidup layak melalui indikator pendapatan nasional bruto per kapita (GNI *per capita*).

Upaya untuk meningkatkan IPM terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui tiga sektor pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi (hidup layak). Sektor pendidikan diperoleh melalui indikator harapan tahun bersekolah dan rata-rata waktu sekolah, sektor kesehatan diukur dari angka harapan hidup dan sektor hidup layak diukur melalui pendapatan nasional bruto (PNB). Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah yang diukur berdasarkan nilai IPM serta mengejar ketertinggalan dari negara lain dengan IPM di atas Indonesia, yaitu Thailand (74), Brunei Darussalam (86,5), Malaysia (78,9), dan Singapura (92,5), dibandingkan Indonesia yang masih berada dalam kategori *medium human development* dengan angka IPM sebesar 68,9. Upaya dalam meningkatkan IPM tidak terlepas dari peran serta pembangunan manusia di setiap provinsi, kabupaten ataupun kota di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan dana anggaran pembangunan khusus untuk daerah tersebut yang berkaitan dengan desentralisasi ekonomi (otonomi daerah). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan. Dalam



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

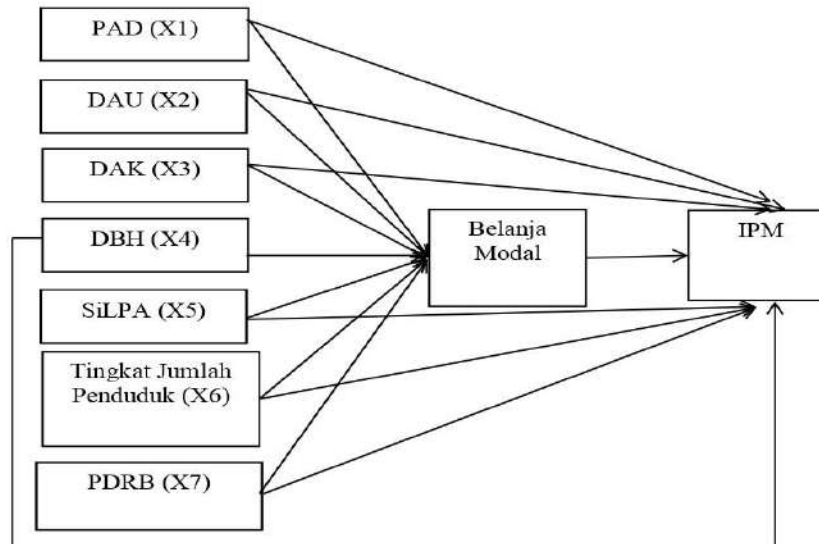
TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



penelitian ini, peningkatan IPM dikaitkan dengan PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, Tingkat Jumlah Penduduk (TJP) dan PDRB per kapita yang dialokasikan dalam belanja modal.

Berikut paradigma pemikiran pada penelitian ini:



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014-2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdapat dalam *website* Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah penduduk dan data produk domestik regional bruto per kapita tahun 2014 hingga 2016 yang terdapat dalam katalog BPS. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh/sensus, yaitu penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016.

Teknik Analisis

Pada penelitian ini menggunakan tiga perumusan hipotesis. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam analisis substruktural sebagai berikut:

Persamaan Substruktural I:

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Persamaan Substruktural II:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_5 Y_2 + e$$

Keterangan:

Y₁ : Indeks Pembangunan Manusia

Y₂ : Belanja Modal

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : Dana Alokasi Khusus

X₄ : Dana Bagi Hasil

X₅ : Sisa lebih pembiayaan anggaran

X₆ : Tingkat Jumlah Penduduk



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



$X7$: Produk Domestik Regional Bruto
 e : *Error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Pengujian penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016).

$$Y2 = \alpha + \beta_1 Y_2 X_1 + \beta_2 Y_2 X_2 + \beta_3 Y_2 X_3 + \beta_4 Y_2 X_4 + \beta_5 Y_2 X_5 + \beta_6 Y_2 X_6 + \beta_7 Y_2 X_7 + e1$$

$$Y1 = \alpha + \beta_1 Y_1 X_1 + \beta_2 Y_1 X_2 + \beta_3 Y_1 X_3 + \beta_4 Y_1 X_4 + \beta_5 Y_1 X_5 + \beta_6 Y_1 X_6 + \beta_7 Y_1 X_7 + \beta_8 Y_1 Y_2 + e2$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- $Y1$ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- $Y2$ = Belanja Modal
- $\beta_1.. \beta_7$ = Koefisien jalur $X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7$, dan $Y2$
- $Y2X1$ = Jalur langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Belanja Modal
- $Y2X2$ = Jalur langsung Dana Alokasi Umum (DAU) ke Belanja Modal
- $Y2X3$ = Jalur langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Belanja Modal
- $Y2X4$ = Jalur langsung Dana Bagi Hasil (DBH) ke Belanja Modal
- $Y2X5$ = Jalur langsung Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA) ke Belanja Modal
- $Y2X6$ = Jalur langsung Tingkat Jumlah Penduduk ke Belanja Modal
- $Y2X7$ = Jalur langsung Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) per Kapita ke Belanja Modal
- $Y1X1$ = Jalur langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke IPM
- $Y1X2$ = Jalur langsung Dana Alokasi Umum (DAU) ke IPM
- $Y1X3$ = Jalur langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) ke IPM
- $Y1X4$ = Jalur langsung Dana Bagi Hasil (DBH) ke IPM
- $Y1X5$ = Jalur langsung Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA) ke IPM
- $Y1X6$ = Jalur langsung Tingkat Jumlah Penduduk ke IPM
- $Y1X7$ = Jalur langsung Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) per kapita ke IPM
- $Y1Y2$ = Jalur langsung Belanja Modal ke IPM
- $e1$ = *error term* Belanja Modal
- $e2$ = *error term* Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun untuk Metode *Product of Coefficient* menggunakan metode uji sobel dapat dilakukan dengan cara melihat t hitung. Jika nilai z hitung $>$ nilai z tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2016). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan membandingkan perkalian koefisien regresi pada persamaan I (koefisien a) dan pada persamaan II (koefisien b) dengan standar error ab (S_{ab}):

$$T = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$



TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel di atas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai *absolute* residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Pada hasil uji *run test* penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya.

Berikut hasil regresi untuk persamaan substruktural I dan II:

Tabel 1 Analisis Regresi untuk Persamaan Substruktural I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.842E10	6.649E10		1.029	.309
	PAD	.293	.250	.251	1.169	.249
	DAU	.501	.166	.681	3.017	.004
	DAK	-.112	.210	-.055	-.532	.597
	DBH	.434	.079	.975	5.497	.000
	SiLPA	-.016	.425	-.003	-.038	.970
	TJP	-201102.008	150137.598	-.365	-1.339	.187
	PDRB	-1600.711	2703.513	-.125	-.592	.557

a. Dependent Variable: BM

Tabel 2 Analisis Regresi untuk Persamaan Substruktural II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65.938	1.937		34.042	.000
	PAD	3.326	.000	1.343	4.546	.000
	DAU	1.148	.000	.732	2.180	.035
	DAK	-2.382	.000	-.055	-.393	.696
	DBH	6.072	.000	.641	2.050	.047
	SiLPA	-2.007	.000	-.206	-1.642	.108
	TJP	-1.141	.000	-.973	-2.587	.013
	PDRB	-6.163	.000	-.226	-.789	.435
	BM	1.109	.000	.521	2.527	.015

a. Dependent Variable: IPM

Hasil Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Berdasarkan data yang ada pada penelitian ini maka nilai-nilai koefisien jalur beta dari hasil uji analisis persamaan substruktural pertama (tabel 1) dan persamaan substruktural kedua (tabel 2),



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



sehingga pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan pengaruh total (*total effect*) seperti pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Variabel pada Analisis Jalur

Jalur	Pengaruh langsung (<i>direct effect</i>)	Pengaruh tidak langsung (<i>indirect effect</i>)	Pengaruh Total (<i>total effect</i>)	Keterangan
X1 → Y2	0,251		0,251	X1=PAD X2= DAU X3=DAK X4= DBH X5= SiLPA X6= TJP X7= PDRB Y2= BM Y1= IPM
X2 → Y2	0,681		0,681	
X3 → Y2	-0,055		-0,055	
X4 → Y2	0,975		0,975	
X5 → Y2	-0,003		-0,003	
X6 → Y2	-0,365		-0,365	
X7 → Y2	-0,125		-0,125	
X1 → Y1	1,343		1,343	
X2 → Y1	0,732		0,732	
X3 → Y1	-0,055		-0,055	
X4 → Y1	0,641		0,641	
X5 → Y1	-0,206		-0,206	
X6 → Y1	-0,973		-0,973	
X7 → Y1	-0,226		-0,226	
Y2 → Y1	0,521		0,521	
X1 → Y2 → Y1	1,343	0,130771	1,473771	
X2 → Y2 → Y1	0,732	0,354801	1,086801	
X3 → Y2 → Y1	-0,055	-0,028655	-0,083655	
X4 → Y2 → Y1	0,641	0,507975	1,148975	
X5 → Y2 → Y1	-0,206	-0,001563	-0,207563	
X6 → Y2 → Y1	-0,973	-0,190165	-1,163165	
X7 → Y2 → Y1	-0,226	-0,065125	-0,291125	

Signifikan atau tidak pengaruh mediasi dapat diuji dengan Metode *Product of Coefficient*. Metode *Product of Coefficient* dapat dilakukan dengan menggunakan uji sobel. Hasil *sobel test* memberikan nilai estimasi *indirect effect* yang kemudian di cari nilai z hitungnya dengan cara membagi besarnya nilai data terhadap nilai *standar error* dan membandingkan dengan z tabel sebesar 1,96.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



Tabel 4 Hasil Sobel Test

	Z hitung
PAD	1,17
DAU	3,01
DAK	-0,53
DBH	5,49
SILPA	-0,03
TJP	-1,33
PDRB	-0,59

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ($\alpha=1\%$) yang berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adiputra dkk (2015), Putra dan Ulupui (2015), dan Dithisari (2017) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif signifikan antara PAD dan IPM. Namun berbeda dengan penelitian Marbun (2011) dan Damayanti (2014). Bukti yang menunjang hasil penelitian ini dapat dilihat pada data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, Kota Palembang memiliki PAD terbesar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp781.413.947.765,14 dengan angka IPM terbesar pula yaitu sebesar 76,59, sedangkan untuk nilai PAD terendah sebesar Rp 8.903.213.895,13 terdapat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan angka IPM terendah pula yaitu sebesar 59,89. PAD akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya menjadi lebih besar sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera sehingga berdampak pada peningkatan IPM. Dengan demikian, hipotesis 1a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM diterima.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,249 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Yovita (2011) dan Wandira (2013) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun bertolak belakang dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah untuk membiayai belanja daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Dengan demikian, hipotesis 1b yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh belanja modal dalam mengintervensi PAD terhadap IPM didapatkan hasil z hitung yaitu 1,17 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh PAD terhadap IPM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Adiputra dkk (2015), namun berbeda dengan penelitian Raviyanti dkk (2017), bahwa PAD berpengaruh



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), [HP 081 252 651 675](tel:081252651675)



terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa PAD secara langsung dapat meningkatkan IPM tanpa dialokasikan melalui belanja modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendanaan yaitu PAD yang fungsinya antara lain dialokasikan untuk layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan indikator dalam IPM. Dengan demikian, hipotesis 1c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi PAD terhadap IPM ditolak.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAU sebesar 0,035 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian Harahap (2017), Damayanti (2014) serta Putra dan Ulupui (2015) sejalan dengan penelitian ini yang menemukan hasil positif dan signifikan DAU terhadap IPM. Namun berbeda dengan penelitian Marbun (2011) yang menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara DAU dan IPM. Bukti yang menunjang hasil penelitian ini dapat dilihat pada data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, Nilai maksimum DAU sebesar Rp 1.292.124.896.000 terdapat di Kota Palembang dengan angka IPM terbesar pula yaitu sebesar 76,59. Hasil ini membuktikan pernyataan bahwa IPM sebagai salah satu alokator DAU untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (Badan Pusat Statistik, 2016), wilayah dengan IPM tergolong rendah dapat meningkatkan IPM memperoleh alokasi dana yang berlebih. Dengan demikian, hipotesis 2a yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM diterima.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAU adalah 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ($\alpha=1\%$) yang berarti bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) namun berbeda dengan hasil penelitian Yovita (2011) dan Wandira (2013). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 5 Tahun 2004 tentang sumber pendanaan pemerintah daerah dalam APBD yaitu DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 2b yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima.

Pada uji sobel nilai z hitung yaitu 3,01 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal mengintervensi pengaruh DAU terhadap IPM. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Raviyanti dkk (2017) namun berbeda dengan penelitian Adiputra dkk (2015) bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10%, sedangkan proporsi DAU untuk kabupaten/kota sebesar 90%. Dapat disimpulkan bahwa proporsi DAU kabupaten/kota yang besar cenderung akan membuat pemerintah daerah menggunakannya untuk berbagai jenis belanja daerah sehingga memperbesar alokasi untuk belanja modal yang berkaitan dengan program peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat luas yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan fiskal dan meningkatkan pembangunan manusia. Dengan demikian, hipotesis 2c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAU terhadap IPM diterima.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,696 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian Damayanti (2014) juga menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan dan negatif antara DAK dan IPM, berbeda dengan hasil penelitian Harahap (2017) dan Putra dan Ulupui (2015). Hasil ini dibuktikan dengan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, Kabupaten Banyuasin memiliki DAK tinggi sebesar Rp377.545.536.695 dengan IPM sebesar 65,01 sama halnya dengan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki DAK sebesar Rp339.913.733.853 dengan IPM sebesar 64,75. Maka dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK yang tinggi tidak serta-merta dapat meningkatkan IPM. Dengan demikian, hipotesis 3a yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,597 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Konsisten dengan hasil penelitian Wandira (2013), dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak bergantung pada DAK untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja modalnya dengan menggunakan DAU dan DBH. Dengan demikian, hipotesis 3b yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.

Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -0,53 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adiputra dkk (2015) dan Raviyanti dkk (2017) namun berbeda dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yang menyebutkan bahwa belanja modal mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM. Dapat disimpulkan karena tidak adanya pengaruh antara DAK terhadap IPM dan DAK terhadap belanja modal secara langsung pada penelitian ini mengindikasikan DAK pada Provinsi Sumatera Selatan tidak dialokasikan untuk Belanja Modal yang bertujuan untuk meningkatkan IPM melalui indikatornya seperti bidang pendidikan dan kesehatan, melainkan dialokasikan untuk belanja lain, seperti bidang infrastruktur, kelautan dan perikanan serta prasarana pemerintah (Kemenkeu Nomor. 548 Pasal 3), sehingga DAK yang tinggi belum tentu mengakibatkan IPM yang tinggi pula. Dengan demikian, hipotesis 3c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAK terhadap IPM ditolak.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,047 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil ini sesuai dengan penelitian Harahap (2017) menemukan DBH memiliki pengaruh terhadap IPM. Namun berbeda dengan Marbun (2011) dan Damayanti (2014) yang menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan dan negatif antara DBH terhadap IPM. Menurut Verawaty (2017), DBH merupakan dana yang bersifat *block grants*, yaitu penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh keputusan daerah berdasarkan prioritas daerah yang menyebabkan pengelolaan DBH bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



diperlukan untuk pembangunan daerahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa alokasi DBH yang digunakan untuk membiayai pembangunan maka akan meningkatkan IPM. Dengan demikian, hipotesis 4a yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap IPM diterima.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ($\alpha=1\%$) yang berarti bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian Wandira (2013). Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini dibuktikan dengan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, DBH terbesar yaitu Rp2.416.335.642.901 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan belanja modal terbesar yaitu Rp1.377.481.000.262,88. Data ini memperkuat indikasi bahwa alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah salah satunya belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 4b yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima.

Pada uji sobel nilai z hitung yaitu 5,49 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan belanja modal mengintervensi pengaruh DBH terhadap IPM yang tidak signifikan pada penelitian sebelumnya seperti Adiputra dkk (2015) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 menyatakan bahwa di bidang transfer ke daerah, sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk meningkatkan belanja daerah melalui efisiensi anggaran belanja pusat dengan mengalihkan dana tersebut untuk belanja modal daerah. Terkait dengan hal ini, ke depan diharapkan anggaran belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat dapat dialihkan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis seperti di bidang pertanian, perairan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi di seluruh daerah di tanah air. Dapat disimpulkan karena adanya pengaruh antara DBH terhadap IPM dan DBH terhadap belanja modal secara langsung pada penelitian ini maka DBH yang digunakan untuk membiayai belanja modal bagi kebutuhan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karena dialokasikan untuk indikator IPM. Dengan demikian, hipotesis 4c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DBH terhadap IPM diterima.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel SiLPA adalah 0,108 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian ini tidak konsisten dengan mayoritas hasil penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh SiLPA terhadap IPM seperti penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015) dan Indrawati (2016). Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa SiLPA pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menjadi sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah karena memiliki sumber pendanaan lain seperti PAD, DAU, dan DBH. Pernyataan ini dapat terlihat melalui data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki SiLPA tertinggi sebesar



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



Rp155.557.110.807.10 yang tidak diimbangi dengan peningkatan IPM dengan nilai 61,94. Maka dapat disimpulkan SiLPA yang tinggi tidak berarti bahwa pembangunan manusia di suatu daerah juga turut meningkat. Dengan demikian, hipotesis 5a yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel SiLPA adalah 0,970 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang artinya tidak signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Harcahyo (2013) memperoleh hasil adanya pengaruh SiLPA terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menggunakan SiLPA secara maksimal seperti fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, salah satunya untuk membantu mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja modal sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya ataupun yang telah direncanakan pada tahun yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, hipotesis 5b yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.

Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -0,03 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh SiLPA terhadap IPM. Konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Nuzana dan Riharjo (2016) namun berbeda dengan hasil penelitian Adiputra dkk (2015). Sesuai dengan hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial SiLPA terhadap IPM dan SiLPA terhadap belanja modal, maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA bukan merupakan sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah, dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dikemukakan Wahyu dan Dwirandra (2015). Dengan demikian, hipotesis 5c yang menyatakan belanja modal mengintervensi SiLPA terhadap IPM ditolak.

Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Tingkat Jumlah Penduduk (TJP) adalah 0,013 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Namun memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -2.587, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah secara parsial variabel TJP tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini tidak mampu menunjukkan pengaruh positif TJP terhadap IPM seperti pada penelitian Melliana dan Zain (2013) serta Zakaria (2018), dan sejalan dengan hasil penelitian Astuti dan Astika (2016). Menurut Astuti dan Astika (2016) jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan suatu daerah karena penambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena penambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006 dalam Astuti dan Astika, 2016). Dengan demikian, hipotesis 6a yang menyatakan bahwa TJP berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel TJP adalah 0,187 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Kesimpulannya adalah secara parsial variabel TJP tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan namun tidak ditandai dengan peningkatan belanja modal, seperti Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebesar 799.998 jiwa dengan belanja modal sebesar Rp653.602.575.155,68,



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi meningkat menjadi 811.501 jiwa namun belanja modal menurun sebesar Rp439.408.057.812,00 Dengan demikian, hipotesis 6b yang menyatakan bahwa TJP berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.

Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1,339 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh TJP terhadap IPM. Sesuai dengan hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial TJP terhadap IPM dan TJP terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Devita dkk (2014) namun berbeda dengan hasil penelitian Widiagma (2015). Hasil ini tidak sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Astuti dan Astika, 2016) sehingga hal tersebut menunjukkan tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui belanja modal terhadap IPM. Sesuai dengan hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial TJP terhadap IPM dan TJP terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 6c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi TJP terhadap IPM ditolak.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel PDRB per kapita adalah 0,435 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Kesimpulannya adalah secara parsial variabel PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bhakti dkk (2014) dan Zamharir (2016) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan PDRB per kapita terhadap peningkatan IPM, namun konsisten dengan hasil penelitian Sasana (2012). Menurut Sasana (2012) hasil ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat di daerah belum mampu meningkatkan IPM di daerah tersebut, antara lain disebabkan oleh relatif kecilnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada kemampuan daya beli masyarakat yang lebih rendah seperti terbatasnya pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan sehingga memperlambat peningkatan pembangunan manusia. Dengan demikian, hipotesis 7b yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel adalah 0,557 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah secara parsial variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. PDRB tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan karena adanya transfer bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH dibanding sumber-sumber penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar dibandingkan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, seperti salah satunya data pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2014, dana perimbangan berjumlah Rp1.316.853.841.624,00 dengan PDRB tahun 2014 sebesar Rp19.225.784 Dengan demikian, hipotesis 7b yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



Pada uji sobel nilai z hitung yaitu $-0,59$ lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi $0,05$ yaitu sebesar $1,96$, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh PDRB terhadap IPM. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Setyowati dan Suparwati dkk (2012) namun berbeda dengan Penelitian Sularno (2013). Hasil ini tidak sejalan dengan Badan Pusat Statistik dalam Katalog Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007-2008 (2009), dalam lingkup provinsi, dapat dilihat seefisien apa suatu provinsi dalam mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusia dengan cara membandingkan PDRB per kapita dengan pencapaian IPM-nya. Sesuai dengan hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial PDRB terhadap IPM dan PDRB terhadap belanja modal, dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB per kapita tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan publik yang diukur melalui IPM. Dengan demikian, hipotesis $7c$ yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi PDRB terhadap IPM ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis faktor penentu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel intervensi pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, disimpulkan bahwa PAD, DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Adapun hanya PAD, DAU, DBH dan BM berpengaruh terhadap IPM, namun DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh. Selain itu, hanya DAU dan DBH yang berpengaruh melalui belanja modal terhadap IPM, sedangkan PAD, DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh melalui belanja modal terhadap IPM.

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, alokasi PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan melalui belanja modal terhadap IPM. PAD, dana perimbangan, SiLPA, jumlah penduduk dan PDRB per kapita seharusnya lebih banyak diprioritaskan pada alokasi belanja produktif seperti belanja modal dan tidak hanya pada belanja operasional sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi publik melalui pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Selain itu, perlu adanya pengelolaan dana transfer pemerintah pusat secara lebih bijak oleh pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing menurut peraturan pemerintah atau undang-undang serta pengawasan yang lebih baik melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang berkaitan dengan indikator IPM seperti program kesehatan, pendidikan dan pendapatan sehingga Provinsi Sumatera Selatan akan dapat meningkatkan IPM provinsi yang terus berstatus sedang dari tahun ke tahun menjadi kategori tinggi.

REFERENSI

- Adiputra, I.M.P., Dwiyantari, N.K.D., & Darmada, D.K. (2015). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA XVIII), USU, Medan Sumut, 16-19 September 2015.
- Astuti, I.A.P., & Astika, I.B.P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3): 2416-2446.
- Bhakti, N.A., Istiqomah, & Suprpto. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4): 452-469.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER

Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



- Damayanti, M.I. (2014). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2): 63-70.
- Dithisari, I. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Harahap, R.U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1): 118-130.
- Harcahyo, P. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Kertas Kerja, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Indrawati, C. (2016). *Pengaruh DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2014)*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Marbun, G. (2011). *Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintahan Kota/Pemerintahan Kabupaten di Sumatera Utara*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2): 237-242.
- Nuzana, M., & Riharjo, I.B (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10): 1-22.
- Putra, P.G.M., & Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3): 863-877.
- Raviyanti, A.A, Rahayu, S., & Mahardika, D.P.K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013). *Jurnal Manajemen*, 22(02): 243-256.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1): 1-12.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y.K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah). *Prestasi*, 9(1):113-133.
- Sularno, F.M. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi, Universitas Widyatama, Bandung.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

TEMU DOSEN & CALL FOR PAPER Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP)

Sekretariat: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
Jalan Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281,
[Email:forumakuntansipublik@gmail.com](mailto:forumakuntansipublik@gmail.com), HP 081 252 651 675



- United Nation Development Programme (UNDP). (2016). *Human Development Report Indonesia 2016*.
- Verawaty. (2017). *Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis*. Lambert Academic Publishing: Germany.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *MBiA*, 16(1): 1-10.
- Wahyu, I.P.A., & Dwirandra, A.A.N.B. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SilPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12 (3):546-565.
- Wandira, A.A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1):44-51.
- Widiagma, A.P. (2015). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember.
- Yovita, F.M. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010)*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Zakaria, R. (2018). *Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Zamharir, A. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori Lower Medium di Indonesia*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.